

## Kajian Reflektif Pelaksanaan Program Kampung Deret di Jakarta

Wahyu Pratama Tamba<sup>1\*</sup>, Sari Viciawati Machdum<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia  
email: [wahyu.pratama32@ui.ac.id](mailto:wahyu.pratama32@ui.ac.id)

### Abstract

Slums are one of the phenomena of urban poverty problems caused by the lack of resources for the urban poor to access livable housing. The purpose of this research is to describe government policies in tackling slums in Jakarta through the Kampung Deret Program and analyze the application of social capital in the implementation of the Kampung Deret Program in Jakarta. The research approach used is a qualitative approach with the type of literature review. This method collects relevant data from various reference sources including previous research, books, media coverage, laws, and regulations. The results showed that the Kampung Deret program is one of the policies of the DKI Jakarta Provincial Government in tackling slum problems. In addition, there are differences in the description of community participation in the implementation of the Kampung Deret program caused by unequal responses from the community. The conclusion is that community participation is determined by the existence of reciprocal social relations between residents, as well as between residents and the government, in which there are elements of trust, values, and social norms. This study recommends that future researchers conduct studies on community involvement in the formulation of slum program policies in Jakarta.

**Keywords :** *slums, kampung deret program, social capital*

### Abstrak

Permukiman kumuh merupakan salah satu fenomena masalah kemiskinan perkotaan yang disebabkan minimnya sumber daya masyarakat miskin kota untuk mengakses tempat tinggal layak huni. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi permukiman kumuh di Jakarta melalui Program Kampung Deret dan menganalisis penerapan modal sosial dalam pelaksanaan program Kampung Deret di Jakarta. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis kajian pustaka. Metode ini mengumpulkan data relevan dari berbagai sumber referensi meliputi penelitian terdahulu, buku, pemberitaan media, regulasi Undang-undang dan Peraturan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan program Kampung Deret merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di dalam menanggulangi permasalahan permukiman kumuh. Selain itu, terdapat perbedaan gambaran partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program Kampung Deret yang disebabkan oleh respon yang tidak sama dari masyarakat. Kesimpulannya adalah partisipasi masyarakat ditentukan oleh adanya hubungan sosial timbal balik antara warga, juga antara warga dengan pemerintah, yang didalamnya terdapat unsur rasa percaya, nilai dan norma sosial. Penelitian ini merekomendasikan agar peneliti selanjutnya melakukan kajian tentang pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan program permukiman kumuh di Jakarta.

**Kata Kunci :** *permukiman kumuh, program kampung deret, modal sosial*

\*Corresponding Author: Wahyu Pratama Tamba ([wahyu.pratama32@ui.ac.id](mailto:wahyu.pratama32@ui.ac.id)). <sup>2</sup>Program Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, 16424.

### Citation Suggestion:

Tamba, P. W., Machdum, V. S. (2024). Kajian Reflektif Pelaksanaan Program Kampung Deret di Jakarta. *Journal of Urban Sociology*, 7 (2), 94-111. DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/jus.v1i2.3914>

## Pendahuluan

Kondisi kemiskinan masyarakat di perkotaan ditandai dengan kesulitan dalam mengakses berbagai kebutuhan hidup. Tingkat kemampuan menabung dan konsumsi masyarakat miskin juga terbilang rendah karena rendahnya perolehan pendapatan (Yandri dan Juanda, 2018). Kemiskinan perkotaan semakin kompleks disebabkan fenomena urbanisasi masyarakat desa berpindah ke kota untuk mencari pekerjaan (Masika, 1997, Chimankar, 2016; Octavionesti & Mardiansjah, 2017; Nittin et.al, 2021). Kota menjadi tempat tujuan untuk mencari nafkah dan pemenuhan kebutuhan hidup (Sair, 2015). Akibatnya laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk di perkotaan semakin tinggi (Tamba, 2015:1-2; Alfarabi et al, 2019).

Masalah kepadatan penduduk ditandai dengan jarak antar rumah berdekatan, jumlah penghuni rumah yang tidak sebanding dengan kapasitas rumah, minimnya ruang publik, dan rentan terjadi sengketa antara masyarakat. Penanda kondisi itu telah berlangsung sejak dahulu, paling tidak sejak pertama kali istilah kata *slum* muncul pada tahun 1812, digambarkan dengan keberadaan rumah-rumah petak di tengah kota dalam kondisi kumuh dan padat, yang dibangun untuk kelas pekerja selama berlangsungnya revolusi industri di Inggris (Singh, 2014; Mwamba, 2020).

Studi terkini mengungkapkan akumulasi masyarakat yang tinggal di perkotaan telah lebih dari setengah populasi dunia, bahkan diperkirakan angkanya akan meningkat hingga dua pertiga populasi dunia tahun 2050 (Lasaiba, 2022). Temuan studi tersebut sejalan dengan temuan prediksi Divisi Populasi Departemen Ekonomi dan Isu Sosial PBB, bahwa potensi jumlah penduduk di kota akan menembus 68 persen dari jumlah penduduk dunia (Adeyemi & Shackleton, 2023).

Telah banyak bahasan diskusi mengenai permukiman kumuh perkotaan kaitannya dengan kemiskinan dan urbanisasi. Hasil penelitian mengungkapkan terjadinya proses pertumbuhan urbanisasi dan kawasan permukiman kumuh di perkotaan secara simultan (Daldjoeni, 2003; Chimankar, 2016; Firdaus, 2019). Salah satu kota besar, Kota Jakarta yang juga merupakan ibukota negara Indonesia hingga saat ini tidak lepas dari persoalan permukiman kumuh (Lasaiba, 2022;

Izzatusholekha et al, 2023). Masyarakat yang menempati permukiman kumuh mengalami ketiadaan dukungan jaminan sosial dan kerentanan menghadapi penyakit menular (Demehin, 2022). Fenomena permukiman kumuh di perkotaan bukan persoalan tata ruang semata, namun menunjukkan persoalan kemiskinan masyarakat di suatu daerah kota. Demikian juga dinamika kehidupan permukiman kumuh di perkotaan secara faktual menggambarkan situasi dan dampak yang sedemikian kompleks.

Selama ini pola penyebaran permukiman terjadi secara alami atau karena keinginan masyarakat untuk membentuk area permukiman tanpa perencanaan sebelumnya. Situasi tersebut yang justru menjadi faktor pendorong muncul dan terbentuknya permukiman liar dan kumuh di perkotaan (Putri & Ridlo, 2023). Berdasarkan penjelasan tersebut, permukiman kumuh secara umum, termasuk di Jakarta menunjukkan pola persebaran penduduk yang memanjang, dimana masyarakat cenderung memilih bertempat tinggal di area sempadan sungai, jalan umum, dan rel kereta api.

Terhadap kompleksitas masalah permukiman kumuh, dibutuhkan peran pemerintah daerah dengan segala perangkat yang dimilikinya seperti kebijakan dan peraturan, anggaran, personil dan lain-lain. Darrundono dalam Verdiansyah (2006:170) menekankan urgensi peran pemerintah yang harus berpihak kepada masyarakat miskin. Berdasarkan sejarah penanganan permukiman kumuh di Indonesia, pemerintah membaginya ke dalam beberapa periode waktu, pertama, pada 1969-1984 diselenggarakan proyek Muhammad Husni Thamrin (MHT) I yang berhasil dalam peningkatan kualitas lingkungan dan memfasilitasi ketersediaan perumahan secara terpadu. Kedua, Tahun 1985-1989 proyek MHT II yang dilaksanakan sektoral dengan menyasar Daerah Aliran Sungai. Ketiga, proyek MHT III pada tahun 1990-2000 diselenggarakan di 85 wilayah kelurahan mengusung gagasan Tribina meliputi komponen sosial, ekonomi dan fisik lingkungan. Keempat, pada tahun 2009-2012 melaksanakan upaya perbaikan kampung MHT secara terpadu (Eni, 2015).

Dengan kondisi faktual permukiman kumuh di kota selama ini, secara global berbagai negara di dunia telah memberikan perhatian

kepada perkotaan yang berkelanjutan untuk kepentingan masa depan. Dari tujuh belas tujuan global, salah satunya mengenai kota yang berkelanjutan dengan harapan agar kemajuan kota menjadi lebih baik dan tercipta keserasian dalam pengembangan kondisi lingkungan ideal (Ngoyo, 2018).

Dalam rangka mewujudkan kota yang lebih baik, diperlukan kebijakan pemerintah untuk menanggulangi fenomena permukiman kumuh. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi permukiman yang kondisinya buruk dan juga tidak sehat menjadi lebih nyaman dengan lingkungan yang sehat (Rukmana, 2018). Sejak Tahun 2013, Pemerintah Provinsi Jakarta menyelenggarakan program Kampung Deret untuk menata kampung-kampung tengah kota yang dinilai sebagai kawasan permukiman kumuh agar lebih baik. Program Kampung Deret diatur saat itu melalui Peraturan Gubernur tentang Bantuan Perbaikan Rumah di Permukiman Kumuh melalui Penataan Kampung, No. 64 Tahun 2013.

Pelaksanaan pembangunan Kampung Deret bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah dan lingkungannya, namun tidak memindahkan warga ke lokasi lain (Rukmana, 2018) dan tetap memperhatikan karakter asli lingkungan sehingga membuat warga melakukan banyak adaptasi (Pinesti, 2017). Pada salah satu lokasi Kampung Deret, masyarakat Petogogan saat mengikuti pembangunan Kampung Deret mereka tidak direlokasi. Terkait manfaatnya, rumah masyarakat Kampung Deret Kapuk, Jakarta Barat telah diperbaiki dan setelah pelaksanaan Program Kampung Deret, lingkungan permukimannya tidak lagi terkena banjir.

Sebelum rumah kampung deret dibangun, pada umumnya masyarakat setempat yang sebagian besarnya berpendapatan rendah hidup dalam kondisi lingkungan yang buruk. Mereka mengalami kesulitan untuk mengakses permodalan dana untuk perbaikan rumah karena rumah yang dimilikinya tidak diakui di dalam sistem kerangka hukum formal. Penyebabnya karena proses pengurusan birokrasi sertifikat hak milik cenderung sarat manipulasi dan koruptif sehingga menjadi penghambat efektivitas program Kampung Deret (Rukmana, 2018).

Lebih lanjut, penelitian Aditantri dan Jamila (2019) juga menemukan hasil yang sama,

khususnya dampak perubahan setelah dilaksanakannya program Kampung Deret di Petogogan, Jakarta Selatan. Lingkungan rumah dan jalan permukiman serta lahan parkir lebih tertata dan semakin baik, disertai dengan peremajaan sarana sanitasi dan pembangunan taman. Namun studi Safitri dan Safitri (2021) mengungkapkan adanya kekurangan dari program Kampung Deret Petogogan diantaranya, konsistensi masyarakat dalam memelihara bangunan agar bentuknya tidak berubah dan menghilangkan citra kumuh, meningkatkan kualitas air PAM yang digunakan masyarakat sehari-hari, menambah jumlah tempat sampah di beberapa area permukiman berikut membangun sistem pemilahan sampah, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara menggunakan alat pencegah kebakaran.

Hasil dan simpulan penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Florencetina & Aditantri (2022), berdasarkan indikator Kotaku yang disusun Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, program Kampung Deret membawa perubahan lebih kepada aspek fisik lingkungan meliputi bangunan dan sarana prasarana sekitarnya. Namun perubahan tersebut dinilai tidak cukup, karena setelah dilaksanakan program kampung deret, kategori wilayahnya masih stagnan didalam tingkat kumuh, meskipun pada tingkat ringan. Artinya, program Kampung Deret tidak mampu secara efektif dalam penanggulangan masalah permukiman kumuh. Beberapa indikator Kotaku yang belum tercapai, diantaranya bangunan permukiman masih terbilang padat, akses jalan yang sempit, risiko sumber air minum tercemar, belum memadainya sarana prasarana penanganan kebakaran, tidak terlaksananya infrastruktur teknis dalam sistem pengelolaan sampah meliputi pemilahan, pewadahan dan pengelolaan.

Terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan Program Kampung Deret, baik secara teknis dan juga kurangnya informasi sekaligus pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat permukiman kumuh yang kompleks dan beragam. Akibatnya, upaya menerjemahkan kebijakan ke dalam pelaksanaan program tidak efektif dan hasilnya tidak maksimal (Nurdiansyah, 2018).

Selain itu, minimnya partisipasi masyarakat menyebabkan kebijakan perbaikan kawasan kumuh tidak efektif. Masyarakat

menolak terlibat dalam program Kampung Deret seperti tidak mau direlokasi karena kendala finansial dan kondisi sosial ekonomi lainnya. Kompleksitas masyarakat sasaran program pada umumnya tidak mempunyai jaminan aset kepemilikan, hal itu menyebabkan mereka lebih rentan terhadap tindakan penggusuran dan kurang mampu berpartisipasi dalam berbagai program perbaikan. Keragaman kelompok sasaran yang tidak ditangani dengan baik di dalam kebijakan pemerintah mengakibatkan terhambatnya efektivitas implementasi program Kampung Deret. Kondisi ini tergambar di dalam pelaksanaan program Kampung Deret Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sehingga studi ini merekomendasikan pemerintah untuk pelaksanaan kebijakan penanganan kawasan kumuh kota kedepannya, yang memerlukan pendekatan khusus dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan penghuni kawasan kumuh (Nurdiansyah, 2018).

Penelusuran mediapun mengungkapkan dinamika ketegangan sosial di Kampung Deret Petogogan, dimana terjadi hubungan yang renggang antar warga penerima manfaat dan yang tidak menerima. Penyebabnya karena adanya rumah warga yang lebih bagus lolos seleksi sebagai penerima dana perbaikan rumah sedangkan rumah yang lebih kumuh tidak lolos seleksi (Kompas.com, 2014). Hal ini menunjukkan implementasi kriteria seleksi penerima program yang tidak selaras antara kebijakan Pergub DKI dengan realita di lapangan.

Keberhasilan program Kampung Deret Tanah Tinggi Jakarta Pusat ditentukan peran serta warga pada setiap tahapan program meliputi tahap pengambilan keputusan, tahapan persiapan, tahapan Pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Titik tekan penelitian tersebut menyoroti partisipasi masyarakat yang dominan di dalam tahapan pelaksanaan program (Marcel, 2013). Sementara kendala program datang dari sisi masyarakat dan pemerintah. Dari sisi masyarakat, keterbatasan lokasi rencana pembangunan untuk akses kendaraan pengangkutan bahan bangunan, kemudian bagi warga yang bekerja mengalami kendala waktu untuk terlibat di dalam pembangunan dan ketiadaan fasilitas tidak adanya fasilitas MCK umum untuk bisa digunakan warga yang terlibat dalam pembangunan rumah. Dari sisi

pemerintah, menghadapi kesulitan untuk mengajak warga agar hadir pada kegiatan pertemuan sosialisasi program Kampung Deret karena minimnya koordinasi diantara instansi terkait, kesulitan menghimpun data informasi karena banyak dokumen milik warga yang hilang dan juga terbakar.

Secara umum ditemukan bahwa penelitian tentang pelaksanaan program Kampung Deret yang dilakukan di beberapa wilayah di DKI Jakarta menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil Kampung Deret di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat menyimpulkan bahwa program Kampung Deret efektif dalam penanganan dan penyelesaian masalah pemukiman kumuh. Sementara itu, penelitian program Kampung Deret di Jakarta Selatan menunjukkan hasil yang sebaliknya. Studi ini berupaya mendalami permasalahan berbedanya hasil dari pelaksanaan program Kampung Deret di beberapa wilayah di Jakarta, yang mana landasan yuridis dan penyelenggaranya sesungguhnya tidak berbeda. Pergub No. 64 Tahun 2013 merupakan landasan yuridis, dan pihak pelaksananya adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, adanya potensi ketegangan sosial di tengah pemukiman Kampung Deret, terutama antara penerima program dan sebaliknya (Kompas.com, 2014).

Merespon secara kritis perbedaan hasil penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan konsep modal sosial sebagai kerangka penting dalam memahami penyelenggaraan program Kampung Deret di DKI Jakarta. Pendekatan dalam memahami Kampung Deret tidak saja berfokus terhadap aspek fisik, namun juga menekankan pada aspek penguatan hubungan sosial masyarakat yang dapat memfasilitasi perubahan positif di dalam masyarakat (Sair, 2015) agar program Kampung Deret lebih holistik dan berkelanjutan.

Secara esensial, terdapat dua alasan penting konsep modal sosial digunakan sebagai perspektif penelitian ini, antara lain: pertama, dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, tidak ada satupun penelitian yang menggunakan konsep modal sosial sebagai pendekatan alternatif untuk menjelaskan pelaksanaan program Kampung Deret, hal ini sekaligus sebagai kebaruan (novelti) penelitian ini. Kedua, keberhasilan program Kampung Deret di DKI Jakarta juga ditentukan oleh aspek

sosial, disamping aspek aspek yuridis, dan struktural dan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat dua tujuan penelitian, pertama, untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi permukiman kumuh di Jakarta melalui Program Kampung Deret, yang ditopang dengan penjelasan kemiskinan dan urbanisasi sebagai faktor utama pendorong terjadinya pemukiman kumuh. Kedua, untuk menganalisis penerapan modal sosial dalam pelaksanaan program Kampung Deret di Jakarta.

## Metode

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan memahami fenomena permukiman kumuh perkotaan serta kebijakan permukiman yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan kualitatif menurut Babbie (2004:417) adalah metode yang berupaya menyingkap makna lebih dalam terhadap suatu fakta pengalaman perilaku dan memperoleh data secara kualitatif. Selanjutnya jenis penelitian menggunakan kajian pustaka dengan melakukan penelusuran berbagai sumber referensi pustaka yang relevan meliputi jurnal penelitian, buku, pemberitaan media, kebijakan dan regulasi pemerintah.

Studi kepustakaan menurut Zed (2004: 4) adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan data-data kepustakaan, kemudian membaca referensi dan data, hingga mencatatnya dan mengolah sebagai bahan penelitian. Terdapat empat karakteristik kajian pustaka, yaitu: pertama, peneliti berinteraksi langsung dengan teks, bukan dengan data angka atau informasi dari lapangan; kedua, kajian ini bersifat siap pakai (*readymade*); ketiga, data kepustakaan tidak terikat oleh ruang dan waktu; dan keempat, umumnya menggunakan data sekunder (Zed, 2004:3-5). Kajian pustaka dapat diklasifikasikan dalam *nonreactive research*. Neuman (2014:49) mendefinisikan *nonreactive research* sebagai metode penelitian yang dilakukan tanpa diketahui oleh masyarakat yang sedang ditelitinya.

Sumber referensi khususnya artikel penelitian ilmiah, yang terdokumentasi di dalam tools pencarian google scholar. Dasar argumentasi penggunaan referensi artikel ilmiah berbasis google scholar karena telah menjadi

basis data yang terbesar digunakan para peneliti (Baneyx, 2008 dalam Poerwanti et. al., 2024). Pencarian dan penggunaan artikel ilmiah pada google scholar menggunakan beberapa kata kunci meliputi kemiskinan kota, permukiman kumuh dan kebijakan permukiman. Seluruh data yang telah dikumpulkan langkah berikutnya melakukan analisis secara komprehensif untuk memberikan makna atas data yang telah diperoleh dan mengabstraksikannya dalam sub-sub bahasan untuk menjawab rumusan masalah studi penelitian Creswell (2014:194; 2019:45).

## Hasil dan Pembahasan

### Permukiman Kumuh di Jakarta

Secara faktual didukung dengan literatur terdahulu, penyebab kemunculan permukiman kumuh di wilayah perkotaan salah satunya karena faktor kemiskinan. (BPS DKI Jakarta, 2023:26). Masyarakat miskin menempati kawasan permukiman kumuh misalnya di kolong fly over dan kolong jembatan (Yandri & Juanda, 2018). Ketersediaan lahan untuk kawasan permukiman juga menjadi sorotan kritis studi ini. Kondisi peningkatan jumlah penduduk tidak diikuti dengan ketersediaan dan perkembangan luasan permukiman. Selain itu, lahan perkotaan telah dibangun fasilitas publik dan bisnis seperti apartemen, perkantoran dan pusat perbelanjaan (Susilowati, 2016).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan pada tahun 2023 merujuk data Badan Pusat Statistik terdapat 450 Rukun Warga tergolong kumuh. 2000 RW diantaranya telah ditangani, sedangkan sisanya 200 RW akan dibenahi bertahap hingga tahun 2026 (Antara, 6 Januari 2023). Latar belakang pembenahan permukiman kumuh, selain kumuh juga karena kondisi lingkungan yang padat, tidak sehat, minim sirkulasi udara dan pencahayaan matahari (Antara, 6 Januari 2023).

Masalah yang rentan dialami masyarakat permukiman kumuh diantaranya sanitasi buruk, tingginya potensi kebakaran, terpapar penyakit dan minim fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan dan taman yang dapat digunakan sebagai tempat bermain anak dan ruang berinteraksi. Komarudin (1997:96-97) mengungkapkan, lingkungan permukiman kumuh memperlihatkan kondisi tempat hunian

berdasarkan, lingkungan tidak teratur, minim prasarana seperti sanitasi, air bersih dan saluran pembuangan, jaringan listrik, lingkungan menjadi sumber penyakit, dan kurangnya fasilitas layanan sosial seperti balai pengobatan, rumah ibadah, sekolah serta mata pencaharian warga tidak tetap dan tingkat pendidikan rendah.

BPS DKI Jakarta (2023:36-37) menjelaskan bahwa rumah tangga di DKI Jakarta mayoritas telah memiliki sanitasi yang baik, ditandai dengan kepemilikan dan penggunaan fasilitas buang air besar (BAB) sendiri sebesar 87,83 persen, kemudian 9,29 persen menggunakan fasilitas BAB bersama, 2,29 persen menggunakan fasilitas jamban secara komunal/ umum dan sebesar 0,52 persen warga tidak menggunakan fasilitas apapun untuk kepentingan BAB. Pada umumnya, kondisi tersebut terjadi di kawasan permukiman yang padat penduduk dan kumuh, biasanya warga demikian untuk keperluan BAB di sekitar sungai atau kali yang ada di lingkungan permukimannya.

### **Kebijakan dan Program Penanggulangan Permukiman Kumuh di Jakarta**

Dalam tingkatan regulasi nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan regulasi Pemerintah Pusat dan menjadi rujukan setiap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program kebijakan perumahan dan permukiman. Secara khusus, pada Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang, dan Pasal 56 ayat (2) bahwa penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim.

Undang-undang ini mengamanatkan penyelenggaraan kawasan permukiman untuk tujuan menciptakan hunian yang berkelanjutan dan pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak, sehat dan aman. Meskipun telah memberikan perhatian kepada kehidupan

berkelanjutan dan pemenuhan hak tempat tinggal, UU ini cenderung lebih berfokus kepada aspek tata ruang dan tidak memberikan perhatian kepada aspek ketidakmampuan masyarakat mengakses kebutuhan tempat tinggal oleh karena faktor kemiskinan.

Beberapa regulasi Provinsi DKI Jakarta yang berkaitan dengan Perumahan dan Permukiman antara lain: pertama, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 64 Tahun 2013 tentang Bantuan Perbaikan Rumah di Permukiman Kumuh melalui Penataan Kampung. Kedua, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu. Ketiga, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana Dan Sarana Di Kawasan Perumahan Dan Permukiman.

Terdapat beberapa program yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkaitan dengan revitalisasi permukiman yaitu Program Kampung Prioritas dan Program Kampung Deret. Program kampung prioritas, berupaya melakukan penataan kampung di beberapa lokasi yang dijadikan prioritas pembangunan oleh Pemprov DKI Jakarta. Program ini menekankan kampung yang memiliki karakter khas dan unik dari suatu kampung yang ada di tengah kota Jakarta. Telah dilaksanakan program prioritas di beberapa lokasi diantaranya, pembangunan kampung susun produktif tumbuh di Cakung, Jakarta diresmikan pada 25 Agustus 2022 dengan sasaran 75 hunian warga; pembangunan kampung susun aquarium, Jakarta Utara diresmikan tanggal 17 Agustus 2021 dengan daya tampung 105 hunian warga dan pembangunan kampung susun kunir, Jakarta Barat pada 10 September 2022 dengan daya tampung 33 hunian.

### **Program Pembangunan Kampung Deret**

Pihak Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan upaya mengatasi persoalan permukiman kumuh dengan Program Kampung Deret yang dilaksanakan tahun 2013 lalu. Program tersebut merupakan bentuk produk turunan pelaksanaan mandat UU Nomor 1 Tahun

2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Rukmana, 2018).

Program tersebut pertama kali dilaksanakan pada bulan Juli 2013 lalu di wilayah Tanah Tinggi Jakarta Pusat (Tamba, 2015). Landasan regulasi program Kampung Deret yaitu Pergub DKI Jakarta Nomor 64 Tahun 2013. Terdapat tiga tujuan Pergub tersebut antara lain: pertama, menata permukiman kumuh menjadi permukiman yang sehat dan nyaman; kedua, peningkatan peran serta dan tanggung jawab individu, keluarga dan/atau masyarakat dalam upaya penataan permukiman kumuh; dan ketiga, meningkatkan kualitas hidup individu, keluarga dan masyarakat secara berkesinambungan dan terintegrasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta.

Konsep program pembangunan Kampung Deret ini membawa gagasan konsep penataan kampung di Jakarta. Pola yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bentuk bantuan sosial dan mengalokasikan anggaran bantuan perbaikan rumah warga beserta Prasarana Sarana Umum (PSU). Setiap warga mendapatkan bantuan sebesar 1,5 juta/meter persegi, dengan luas maksimal 36 meter persegi senilai Rp. 54.000.000.

Program Kampung Deret dilaksanakan di lima wilayah DKI Jakarta, dengan total dua puluh enam lokasi. Jakarta Pusat merupakan wilayah paling banyak sepuluh lokasi, sedangkan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan merupakan wilayah paling sedikit, masing-masingnya tiga lokasi.

Tabel 1. Program Kampung Deret Tahun 2013

Wilayah	Jumlah Lokasi
Jakarta Pusat	10
Jakarta Utara	6
Jakarta Barat	3
Jakarta Selatan	3
Jakarta Timur	4
<b>Total Penataan Kampung tahun 2013</b> Jumlah rumah = 4.467 unit	<b>26</b>

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, (2020).

Total penerima bantuan perbaikan rumah sebanyak 4.467 Kepala Keluarga yang tersebar di lima wilayah Jakarta. Jumlah warga di Jakarta

Pusat menerima paling banyak, sebanyak 2.434 KK dan jumlah paling sedikit Jakarta Utara sebanyak 230 KK

Tabel 2. Jumlah Penerima Perbaikan Kampung Tahun 2013

NO	WILAYAH	JUMLAH RUMAH (UNIT)
1	JAKARTA PUSAT	2434
2	JAKARTA UTARA	230
3	JAKARTA BARAT	367
4	JAKARTA SELATAN	602
5	JAKARTA TIMUR	834
<b>TOTAL</b>		<b>4467</b>

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, (2020).

Selain dilaksanakan pembangunan Kampung Deret di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, program Kampung Deret juga telah dilaksanakan di beberapa lokasi lain, meliputi wilayah RW 005 Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jaksel; wilayah RW 002 Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jaktim; wilayah RW 004 Kelurahan Cilincing, Koja, Jakarta Utara. Upaya menata permukiman kumuh untuk mewujudkan pemukiman yang bersih, nyaman dan asri sebagaimana mandat Pergub Nomor 64 Tahun 2013 (Pemprov DKI Jakarta, Maret 2022).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2013) mengungkapkan, indikator target di dalam pelaksanaan program Kampung Deret salah satunya yaitu adanya partisipasi masyarakat di permukiman kumuh. Adanya pelibatan masyarakat miskin yang tinggal di permukiman kumuh menunjukkan bentuk penghormatan hak asasi manusia dan merupakan satu upaya strategis pemerintah dalam peningkatan kapasitas bertahan hidup masyarakat tanpa membuatnya bergantung kepada pihak pemberi program (Marcel, 2013).

### Tantangan dan Peluang Pelaksanaan Program Kampung Deret

Konsep Kampung Deret secara fungsional telah cukup untuk menampung kegiatan masyarakat sehari-hari, namun seiring semakin padatnya penduduk dan lahan yang terbatas di Jakarta membuat konsep ‘kampung’ tidak dapat berjalan secara maksimal. Pada dasarnya kampung bermakna sebagai permukiman yang

memiliki karakteristik yang khas seperti kedekatan secara sosial budaya berupa kekeluargaan dan kebersamaan (Makhmud et al, 2017). Begitupun dengan memaknai Kampung Kota, secara alami menunjukkan kemampuan dan kondisi masyarakat di dalamnya menjaga kehidupan keaslian tradisional meskipun di tengah kehidupan modernisasi kota (Putera, 2014; Pranata, 2019; Ashadi, 2022). Dengan kata lain, program Kampung Deret tidak secara menyeluruh memaksimalkan potensi masyarakat kampung kumuh Jakarta yang wilayahnya diperbaiki oleh pemerintah.

Hasil penelitian program Kampung Deret Petogogan Jakarta Selatan yang dilakukan Pramantha (2017) menunjukkan bahwa meskipun telah memenuhi standar kebutuhan rumah secara minimum, namun secara keseluruhan permukiman Kampung Deret Petogogan belum memenuhi standar tata cara dalam perencanaan lingkungan permukiman dan standarisasi mengenai rumah sederhana yang sehat (RSS). Selain itu, status kepemilikan tanah merupakan milik pemerintah, sehingga sertifikat untuk setiap bangunan warga masih berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Dengan kata lain, pemerintah kapanpun bisa menggunakan tanah tersebut yang membuat warga akan pindah dari wilayah tersebut.

Pramantha (2017) menunjukkan dalam hasil penelitiannya, bahwa meskipun Kampung Deret Petogogan telah memenuhi standar kebutuhan rumah minimum, namun secara keseluruhan belum memenuhi standar tata cara perencanaan lingkungan perumahan dan standar rumah sederhana sehat (RSS). Selain itu, status kepemilikan tanah merupakan milik pemerintah, sehingga sertifikat untuk setiap bangunan warga masih berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Dengan kata lain, pemerintah kapanpun bisa menggunakan tanah tersebut dan sewaktu-waktu warga akan pindah dari wilayah tersebut.

Putra (2016) menjelaskan program Kampung Deret di Petogogan lebih berfokus pada aspek peningkatan fisik permukiman. Bagi warga penghuni rumah yang telah diperbaiki lebih merasakan kenyamanan karena bangunan lebih rapi dan lingkungan sekitar tertata. Namun pemerintah abai untuk memperhatikan dampak psikologis warga pasca pembangunan rumah deret. Ini berkaitan dengan adaptasi penggunaan fasilitas baru di dalam rumah permanen milik

warga seperti toilet, rumah permanen, akses air bersih dan fasilitas sarana umum di lingkungan setempat seperti tempat sampah dan ruang terbuka hijau.

Proses pembuatan desain rumah warga secara faktual tidak melibatkan warga namun hanya berdasarkan rekomendasi konsultan pemerintah. Kondisi tersebut menandai pendekatan sosial tidak berjalan baik, karena pemerintah daerah hanya mengandalkan konsultan dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kampung Deret. Temuan itu menggambarkan tingkat partisipasi warga yang rendah dalam proses pembangunan yang berdampak terhadap kesenjangan antara harapan warga setempat dengan hasil program Kampung Deret. Berikutnya, minimnya sosialisasi membuat sikap dan kebiasaan lama dari warga tidak berubah pada saat rumah deret dibangun. Substansi pembangunan Kampung Deret tidak saja menyoal aspek fisik namun juga peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat.

Namun hasil berbeda ditunjukkan melalui penelitian penelitian Rukmana (2018), yang menunjukkan adanya kerjasama diantara anggota masyarakat pada saat proses dan setelah pembangunan permukiman program Kampung Deret secara swadaya. Tingginya tingkat kerjasama antara masyarakat merupakan aset yang penting dalam pengembangan ekonomi kolaboratif di lingkungan permukiman Kampung Deret. Yayat Supriatna (dalam Rukmana, 2018) menjelaskan begitu pentingnya pelaksanaan pembangunan rumah Kampung Deret oleh Pemprov DKI Jakarta dalam rangka penyediaan rumah bagi masyarakat miskin yang berada di kampung padat Jakarta. Tanpa dana bantuan dari Pemprov DKI Jakarta masyarakat miskin Jakarta tidak akan mampu untuk membangun dan memperbaiki tempat tinggalnya karena terbatasnya dana. Akibatnya tentu mereka akan senantiasa tinggal di bangunan rumah sementara dan semi-permanen di berbagai kampung padat dengan kondisi semrawut.

Studi lain menemukan beberapa kekurangan setelah pelaksanaan pembangunan Kampung Deret di Petogogan, Jakarta Selatan selesai diantaranya, merujuk pada tingkat partisipasi masyarakat terkait tindakan konsisten masyarakat untuk pemeliharaan dan perawatan bangunan rumah deret beserta lingkungannya.

Apabila tidak dijaga dengan baik, berpotensi akan kembali ke kondisi semula yang kumuh. Selain itu, kekurangan lainnya seputar sarana prasarana yang belum memadai diantaranya akses dan kualitas air PAM setempat untuk kebutuhan sehari-hari, kurangnya jumlah fasilitas tempat sampah dan belum adanya sarana pemilahan sampah dan sosialisasi penggunaan alat pencegahan kebakaran (Safitri & Safitri, 2021; Kompas.com, 2014).

Studi Kampung Deret di Tanah Tinggi Jakarta Pusat menunjukkan secara spasial pada dasarnya masih mencerminkan kampung di tengah kota. Tidak banyak ditemukan perubahan setelah Kampung Deret selesai dibangun, perubahan yang ada menunjukkan karakter kampung kota yang sebelumnya tidak teratur diubah menjadi semi teratur. Adapun perubahan menonjol tampak pada beberapa hal seperti perbaikan fisik rumah hunian, pelebaran jalan, peningkatan kualitas jalan, pembongkaran bangunan kumuh dan liar, dan peningkatan kualitas fasilitas sarana umum (Pinesti, 2017).

Pelibatan masyarakat dalam program Kampung Deret melibatkan masyarakat merupakan konsekuensi dari pemberian dana bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI kepada warga dalam rangka penataan permukiman kumuh. Selama proses pembangunan rumah warga akan didampingi pihak konsultan pengawas yang ditunjuk pemerintah. Oleh karena itu, pengadaan tenaga kerja dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dalam jumlah banyak secara bersamaan, namun tidak didukung dengan pengetahuan warga dalam hal klasifikasi memilih tenaga kerja sehingga proses pengerjaan pembangunan yang tidak tepat waktu (Machio, 2015).

Darmawan (2014) mengidentifikasi faktor-faktor kendala pada saat pelaksanaan program pembangunan Kampung Deret antara lain: proses inventarisasi tanah berikut bangunan yang berlangsung lama, spesifikasi bangunan yang tidak detail dan akurat, keterlambatan di dalam memobilisasi tenaga kerja hingga proses pembayaran uang yang tidak lancar.

Sejalan dengan beragam studi Kampung Deret lainnya, bahwa secara fisik program Kampung Deret di wilayah Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur (Tamba, 2015) telah berhasil membangun rumah dan lingkungan yang lebih layak huni dan terbarukan. Dari aspek

sosial program tersebut telah mendorong warga untuk beradaptasi dengan lingkungan permukimannya yang baru. Demikian juga keberadaan rumah layak huni beserta lingkungan permukiman yang sehat dan nyaman menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kampung Deret. Selain itu, semakin mempertebal kebersamaan warga yang telah terbangun sejak sebelum dilaksanakannya Program Kampung Deret.

Hasil studi lain yang lokasinya sama di Cipinang Besar Selatan menunjukkan adanya program pemberdayaan masyarakat Kampung Deret di wilayah Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur melalui pengembangan pertanian perkotaan (Rahmawati, 2017). Program tersebut bermanfaat bagi masyarakat setempat dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan penghijauan lingkungan. Sumber dana program tersebut melalui pengajuan proposal oleh warga kepada Pemprov DKI Jakarta untuk pembiayaan sarana produksi pertanian. Kendala yang dihadapi diantaranya masyarakat belum terorganisasi dengan baik dan mendapat perhatian yang kurang dari pemerintah di tingkat kelurahan sehingga menghambat efektivitas pengorganisasian masyarakat.

Berdasarkan hasil beragam studi yang telah dilakukan, diketahui adanya empat hal tantangan dan peluang dalam pelaksanaan program Kampung Deret di Jakarta, diantaranya: pertama, persoalan pembiayaan yang tidak memadai di dalam pelaksanaan suatu program tentunya akan menghambat keberlangsungan pelaksanaan program, potensi penyebabnya karena keterbatasan sumber dana ataupun lamanya pencairan dana. Untuk konteks Program Kampung Deret, secara global sumber dana tidak terbatas karena telah dianggarkan di dalam APBD Provinsi DKI Jakarta. Namun dalam tatanan pelaksanaan di lapangan, setiap warga yang memenuhi kriteria diberikan dana bantuan pembangunan rumah sebesar 1,5 juta/meter persegi, dengan luasan maksimal 36 meter persegi sebesar Rp. 54.000.000. Artinya, dengan sejumlah dana tersebut warga harus mengelolanya dengan baik hingga bangunan selesai dibangun. Penting untuk tidak sekedar memperbaiki bangunan rumah namun melengkapinya dengan beberapa fasilitas rumah yang sehat dan layak huni seperti sanitasi, air dan sirkulasi pencahayaan. Secara umum diketahui

permasalahan pembayaran uang yang tidak lancar karena birokratisasi anggaran sebagai sumber dana program ini, yang mengakibatkan tahapan pembangunan yang tidak tepat waktu.

Kedua, tingkat partisipasi warga menentukan kelangsungan dan keberhasilan program. Namun ditemui di dalam program Kampung Deret, terutama pada tahapan perencanaan desain bangunan rumah tidak melibatkan warga pemilik rumah. Hal ini mengakibatkan masyarakat membutuhkan *effort* besar untuk penyesuaian terhadap fasilitas rumah yang dirancang oleh konsultan pengawas pembangunan. Disamping itu pihak pemerintah juga tidak secara maksimal melakukan sosialisasi kepada warga, baik dalam perencanaan dan cara langkah penggunaan fasilitas yang telah dibangun. Dalam praktiknya sehari-hari potensial masyarakat akan kembali kepada kebiasaan lama saat lingkungan permukiman masih kumuh dan tidak tertata, contoh sederhana seperti membuang sampah tidak pada tempatnya. Demikian juga mengenai rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan mengakibatkan ketidakpuasan dari warga, terjadi kesenjangan antara harapan mereka dengan hasil program. Sebagai peluang, tidak bisa dipungkiri bahwa partisipasi warga datangnya dari inisiasi pemerintah daerah yang menyalurkan dana bantuan perbaikan rumah, di mana warga diberikan kuasa untuk menerima dan mengelola dana tersebut. Hal ini memberikan kesempatan warga untuk membangun rumah layak huni dan sehat sekaligus menata kondisi lingkungan sekitarnya.

Ketiga, permasalahan krusial di seluruh lokasi pembangunan Kampung Deret seputar legalitas kepemilikan tanah. Status yang masuk ke dalam kriteria pembangunan ialah warga yang memiliki dokumen minimal sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Artinya, masyarakat yang memiliki dokumen kepemilikan seperti girik dan *letter C* tidak bisa mengikuti program dimaksud. Kondisi ini memunculkan ketegangan sosial di tengah kehidupan warga, adanya kecemburuan, adanya pandangan yang merasa dibedakan satu dengan lainnya. Kondisi tersebut pada dasarnya dapat direspon pemerintah daerah agar mendorong sekaligus memfasilitasi warga untuk mengurus dokumen kepemilikan ke Kantor Pertanahan setempat. Semakin banyak warga yang terlibat

tidak sekedar berbicara luasnya jangkauan sasaran, namun tentunya dapat menunjukkan tingginya tingkat partisipasi dan dukungan antusias masyarakat terhadap program pemerintah.

Keempat, tantangan kondisi permukiman dan lingkungan yang rawan banjir, seperti di Kapuk, Jakarta Barat dan Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur memiliki kontribusi terhadap keberlanjutan program Kampung Deret. Di wilayah permukiman Kampung Deret Cipinang Besar Selatan, Jaktim misalnya, berdekatan dengan Kali Cipinang yang sewaktu-waktu meluap oleh karena tingginya curah hujan dan kebiasaan warga yang masih membuang sampah ke sungai (Tamba, 2015). Tantangan itu pada dasarnya telah diimbangi dengan penataan lingkungan menjadi lebih rapi dan penyediaan fasilitas tempat pembuangan sampah di berbagai lokasi pembangunan Kampung Deret. Namun demikian, diperlukan adaptasi kebiasaan dan kesadaran warga itu sendiri untuk mendayagunakan fasilitas umum yang telah dibangun.

## **Strategi Pembangunan Permukiman Kampung Deret melalui Modal Sosial**

Modal sosial yang dikembangkan Bourdieu (1986), Coleman (1988) dalam Midgley (2014:151) menekankan tingginya partisipasi dan kohesi sosial masyarakat, kemudian ditandai dengan keberadaan komunitas-komunitas yang berperan sebagai lembaga pengambilan keputusan secara demokratis, dan turut serta dalam mengatasi permasalahan sosial secara kolektif. Alfitri (2011: 61) menyampaikan bahwa modal sosial adalah kapasitas yang timbul dari keyakinan umum dalam suatu masyarakat dan dapat dikodifikasikan dalam kelompok sosial yang lebih kecil. Modal sosial mencakup nilai dan norma, kepercayaan dan integritas, penyelesaian tanggung jawab, siaga untuk membantu satu sama lain, serta komitmen bersama.

Sosiolog Robert M. Z. Lawang (2005:45-46; 220-221) menyebut modal sosial merupakan konstruksi sosial, terbentuk dari adanya interaksi sosial sesama individu dalam mengkonstruksi kekuatan sosial secara bersama untuk upaya penanggulangan berbagai masalah sosial yang dialami masyarakat. Bentuknya berupa kepercayaan (hubungan, harapan dan tindakan,

interaksi sosial), jaringan sosial dan norma. Dengan demikian, berdasarkan definisi dan gagasan para ahli dimaksud, modal sosial berkaitan dengan partisipasi dan tindakan proaktif di dalam jaringan kehidupan masyarakat yang ditentukan oleh interaksi dan hubungan sosial timbal balik satu sama lain (*reciprocity*) yang ditopang oleh rasa percaya (*trust*), norma sosial, dan nilai sosial. Oleh karena itu, modal sosial perlu dimiliki dan dikembangkan dalam rangka membangun masyarakat dengan kehidupan dan lingkungan yang lebih baik. Sejatinya modal sosial akan muncul dari dalam internal kelompok namun perlu didorong lebih lanjut.

Modal sosial berperan penting dalam keberhasilan pembangunan permukiman Kampung Deret di Jakarta. Konsep modal sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Bourdieu dan Coleman, mengedepankan partisipasi dan kohesi sosial yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan sosial secara kolektif. Dalam konteks ini, masyarakat atau komunitas yang aktif dan terorganisir dapat berfungsi sebagai lembaga pengambilan keputusan yang demokratis, sehingga mampu merespons isu-isu yang ada di lingkungan mereka.

Kepercayaan atau rasa percaya (*trust*) sebagai bentuk modal sosial tergambar dari pendekatan dilakukan Gubernur DKI Jakarta saat itu yang berusaha meyakinkan masyarakat agar bersedia mengikuti Program Kampung Deret. Mengusung konsep mengusung penataan rumah dan lingkungan warga menjadi lebih rapi dan memenuhi standar kesehatan. Selain itu, kepercayaan yang terbentuk antara warga digambarkan dengan kapabilitas yang dimiliki Ketua RW untuk meyakinkan sekaligus mengarahkan warganya untuk ikut dalam program penataan permukiman baru yang lebih layak dan rapi. Selain itu, kesediaan warga mempercayakan Ketua RW untuk mengelola dana Program Kampung Deret, karena masyarakat khawatir dana akan habis untuk kebutuhan lain apabila dikelola sendiri, gambaran ini ditunjukkan di dalam studi yang dilakukan Pramantha (2017).

Kepercayaan (*trust*) menjadi elemen kunci dalam membangun modal sosial masyarakat sasaran Program Kampung Deret. Misalnya, pendekatan Gubernur DKI Jakarta yang berupaya meyakinkan masyarakat untuk

mengikuti program penataan lingkungan menunjukkan bagaimana kepercayaan dapat menggugah partisipasi keterlibatan warga. Selain itu, keberadaan Ketua RW yang mampu meyakinkan warga sehingga mereka mempercayakan pengelolaan dana program pembangunan, hal ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan interpersonal yang saling mendukung dalam membangun modal sosial.

Namun, keberhasilan program Kampung Deret tidak hanya bergantung pada struktur fisik pembangunan rumah deret, namun juga pada interaksi sosial yang terbentuk di dalamnya. Putra (2016) menyoroti pentingnya pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat Kampung Deret pasca pembangunan, tujuannya untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan tertata serta keberlanjutan lingkungan kedepannya. Hasil penelitiannya (Putra, 2016) menemukan kebiasaan buruk warga Kampung Deret di Petogogan, Jakarta Selatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Meskipun telah menempati rumah baru yang lebih layak huni, warga belum beradaptasi dengan lingkungan baru dan masih tertambat pada sikap kebiasaan yang lama saat di kawasan kumuh.

Pranata (2019) mengungkapkan, secara esensial pembangunan permukiman baru akan membentuk interaksi sosial yang baru di tengah kehidupan masyarakat setempat. Selain itu, lingkungan menjadi lebih tertata dan rapi didukung dengan sikap gotong royong masyarakat setempat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini juga tampak dalam proses pelaksanaan pembangunan permukiman Kampung Deret Tanah Tinggi, Jakpus. Pada saat pembangunan berlangsung para warga membantu proses pembangunan, menggunakan beberapa sumber daya milik masyarakat dan bergotong royong dalam proses pembangunan renovasi rumah sesuai konsep pemerintah (Marcel, 2013).

Keterlekatan aspek sosial dalam pembangunan permukiman Kampung Deret ditunjukkan dengan adanya partisipasi masyarakat. Dalam pemaknaannya, konsep partisipasi sangatlah beragam seiring dengan semakin populernya kata partisipasi yang berulang di dalam kehidupan masyarakat. Partisipasi menurut Terry dalam Winardi (2002:149) adalah adanya sumbangsih dan turut sertanya individu warga secara mental dan juga

emosional terhadap pengambilan keputusan dan keterlibatannya dalam pelaksanaan tanggung jawab atas keputusan yang ditetapkan. Kemudian Ife & Tesoriero (2008) menjelaskan partisipasi sebagai keterlibatan seseorang atau kelompok di dalam pelaksanaan pembangunan dengan memberikan berbagai masukan seperti pikiran, tenaga, waktu, modal materi dan keahlian hingga ikut menikmati hasil dari program pembangunan.

Partisipasi menurut Mikkelsen (2005:53) diinterpretasikan sebagai kontribusi swadaya masyarakat di dalam pelaksanaan proyek pembangunan, meskipun tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan. Penekanannya adalah partisipasi penting dalam peningkatan kesadaran masyarakat dalam menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan pemerintah. Sementara itu, Adi (2013:231) menekankan partisipasi yang ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam tahap mengidentifikasi masalah dan potensi yang dimiliki, memilih dan menetapkan alternatif solusi tentang alternatif solusi untuk penanganan masalah, termasuk mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Adanya partisipasi keterlibatan masyarakat berguna untuk keberlanjutan permukiman Kampung Deret, yang manfaatnya pun akan dinikmati bersama. Sebaliknya, apabila masyarakat apatis terhadap kondisi sekitar, berpotensi terjadinya penurunan kualitas lingkungan permukiman Kampung Deret. Untuk mengantisipasi hal itu, diperlukan hubungan sosial dan kerjasama diantara warga, dan juga antara warga dengan pemerintah. Selain itu, kerjasama tersebut telah ditopang dengan status perannya masing-masing yang saling berkaitan, di dalam konteks pelaksanaan program Kampung Deret, yaitu masyarakat sebagai pihak penerima manfaat program (*beneficiaries*) dan pemerintah sebagai pelaksana program. Sebagai penerima manfaat program, masyarakat berkepentingan untuk terlibat sejak awal pelaksanaan program dan masyarakat juga memiliki hak untuk berkontribusi di dalam setiap tahapan pembangunan. Sementara itu, pemerintah daerah berperan dalam memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai untuk mendukung partisipasi tersebut. Modal sosial yang kuat akan tercipta dan berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang program Kampung Deret,

menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh penghuni.

Studi ini menekankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kampung Deret menjadi indikator keberhasilan modal sosial. Partisipasi masyarakat ditentukan oleh adanya hubungan sosial timbal-balik diantara warga dan antara warga dengan pemerintah, yang melibatkan unsur rasa percaya, nilai, dan norma sosial. Partisipasi menurut Terry dan Mikkelsen, tidak hanya mencakup keikutsertaan dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga kontribusi sukarela dalam pelaksanaan proyek. Dalam konteks Kampung Deret, interaksi sosial yang terjalin selama pembangunan menciptakan rasa kebersamaan dan gotong royong, yang pada gilirannya menguatkan ikatan sosial dalam masyarakat.

Hubungan sosial timbal balik antarwarga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi. Dukungan dan kolaborasi antarwarga meningkatkan rasa keterlibatan dan tanggung jawab terhadap program, serta membangun ikatan sosial yang kuat. Rasa percaya merupakan pondasi utama dalam membangun partisipasi masyarakat. Ketika warga menilai penyelenggara program transparan dan memiliki niat baik mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi, sebaliknya, ketidakpercayaan dapat menurunkan partisipasi. Untuk itu, menjadi hal penting adanya keterbukaan komunikasi diantara pemerintah dan masyarakat. Demikian juga nilai dan norma sosial berperan dalam menentukan tingkat partisipasi. Program pembangunan yang sejalan dengan nilai-nilai masyarakat, seperti gotong royong, akan lebih mudah diterima dan diikuti.

Hubungan sosial timbal balik antarwarga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi. Dukungan dan kolaborasi antarwarga meningkatkan rasa keterlibatan dan tanggung jawab terhadap program, serta membangun ikatan sosial yang kuat.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa program Kampung Deret berhasil menciptakan interaksi sosial baru yang mendukung kehidupan warga. Selain itu, masyarakat yang aktif terlibat di dalam upaya pembangunan rumah dan juga upaya pemeliharaan lingkungan akan lebih mempunyai rasa memiliki terhadap rumah dan

lingkungannya, hal ini berimplikasi pada keberlanjutan pembangunan yang telah dicapai. Sebaliknya, jika masyarakat menunjukkan sikap apatis, kualitas lingkungan dapat menurun, mengancam hasil pembangunan yang telah dicapai.

Program Kampung Deret di Jakarta Selatan, konstruksi rasa percaya tergambar dari kesediaan warga mempercayakan pengelolaan dana pembangunan kepada Ketua RW di lingkungan tempat tinggalnya. Namun, partisipasi masyarakat terbilang rendah karena sejak saat perencanaan program, warga tidak dilibatkan di dalam menentukan desain rumah dan rencana penataan lingkungan di sekitarnya. Kondisi lain, sosialisasi kepada masyarakat sejak perencanaan dan pada saat pelaksanaan program juga tidak berlangsung optimal. Di dalam pelaksanaan program pembangunan juga mengandalkan pekerja bangunan yang disediakan warga pemilik rumah secara mandiri dengan pengawasan pihak konsultan yang ditunjuk Pemprov DKI Jakarta.

Sementara program Kampung Deret di Jakarta Pusat, warga bergotong royong di dalam proses pembangunan yang telah dikonseptkan pemerintah kemudian pemanfaatan sumber daya warga seperti tenaga dan waktu. Terkait sosialisasi program, sempat menjadi kendala pada saat awal rencana pembangunan, masyarakat enggan untuk hadir pada kegiatan sosialisasi program. Penyebabnya karena kurangnya koordinasi antar instansi terkait meliputi pihak Dinas Perumahan DKI Jakarta, Sudin Perumahan Kota Jakarta Pusat, Kantor Camat Johar Baru dan Kantor Lurah Tanah Tinggi.

Di wilayah Jakarta Timur, kuatnya kebersamaan warga menumbuhkan rasa dan sikap kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungannya, baik pada saat pelaksanaan program Kampung Deret maupun setelah pelaksanaan. Pertemuan silaturahmi forum-forum warga baik formal terjadwal maupun informal, menjadi jembatan untuk menjalin dan menjaga kebersamaan masyarakat Kampung Deret di Cipinang Besar Selatan. Lebih lanjut, adanya kreativitas warga setempat untuk pengembangan pertanian perkotaan di lingkungannya, sehingga dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan para warga. Dinamika dalam pelaksanaannya, menghadapi kendala di

mana kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut belum secara maksimal terorganisir dan kurangnya dukungan pihak kelurahan setempat.

Pelaksanaan program pembangunan Kampung Deret di setiap wilayah menunjukkan perbedaan gambaran partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat di Jakarta Selatan terbilang rendah karena adanya peran konsultan pemerintah saat perencanaan dan desain pembangunan rumah. Sementara itu, warga pemilik rumah berperan dalam penyediaan tukang bangunan secara mandiri, sementara di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Pusat warga berkontribusi dalam pembangunan Kampung Deret seperti bergotong royong saat membangun rumah dan fasilitas pelengkap lingkungan. Artinya, warga memberikan sumbangsih waktu, tenaga dan material. penyediaan material, pembangunan.

Selanjutnya, abstraksi konsep modal sosial dalam konteks pelaksanaan pembangunan Kampung Deret semakin memperjelas kaitan erat aspek sosial dan pembangunan bidang perumahan. Secara prinsip, rumah itu sendiri mengandung makna fungsi sosial yang tidak sekedar menjadi tempat berlindung saja. Namun bermakna jauh lebih penting, rumah dapat berfungsi sebagai tempat kelangsungan sosialisasi, dimana setiap individu di dalam keluarga diperkenalkan beberapa hal penting seperti nilai, gagasan, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakatnya dan juga sebagai tempat individu untuk pemenuhan berbagai kebutuhan hidupnya.

Pada dasarnya terdapat interaksi antara rumah dengan keluarga yang menghuni rumah yakni menyangkut hal fungsi yang telah diberikan rumah kepada penghuninya dan sesuatu hal yang telah dilakukan penghuni bagi rumahnya (Turner, 1972). Dalam pembahasan pembangunan rumah deret, secara fisik menunjukkan kondisi yang lebih layak huni, namun juga berkaitan dengan aspek non fisik di mana rumah yang layak huni dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menempatinnya. Oleh karena itu, pembangunan rumah Kampung Deret memberikan manfaat pada masyarakat di mana proses sosialisasi dapat berlangsung dengan baik di dalam rumah deret. Dalam lingkup lebih luas lagi, tercipta interaksi dan kebersamaan warga untuk berpartisipasi

dalam memajukan program dan keberlanjutan lingkungan permukimannya (Tamba, 2015).

Selanjutnya, program Kampung Deret merupakan program pembangunan sosial di bidang perumahan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Midgley dalam Adi (2013:23) menekankan kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi hidup manusia yang dicapai ketika berbagai masalah sosial dikelola dengan efektif, kebutuhan manusia terpenuhi, dan peluang sosial digunakan secara maksimal.

Permukiman kumuh sebagai suatu masalah sosial kemudian ditanggulangi lewat intervensi kebijakan dan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keberhasilannya ditandai dengan pembangunan rumah layak huni beserta lingkungan yang bersih dan sehat. Program pembangunan rumah deret bukan sekedar membangun rumah yang hasilnya dapat dilihat dari aspek fisik semata, namun bagaimana masyarakat penghuni rumah deret dapat memanfaatkan rumah beserta lingkungannya dan berperan serta menjaganya untuk keberlanjutan permukiman Kampung Deret. Selain pembangunan rumah deret juga dibangun fasilitas pendukung sarana prasarana umum meliputi tempat pembuangan sampah, taman-taman sebagai upaya penghijauan (Tamba, 2015). Tindakan sosial masyarakat untuk berpartisipasi dapat terwujud apabila masyarakat permukiman Kampung Deret sendiri terdorong untuk menjaga kondisi rumah dan lingkungannya.

Terkini, program Kampung Deret sendiri tidak berlanjut dalam penanggulangan kawasan di Jakarta. Sejak Tahun 2014, pelaksanaan program Kampung Deret terhenti karena adanya temuan dan potensi kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan, karena adanya lokasi pembangunan Kampung Deret yang merupakan tanah milik negara. Apabila kedepannya program tersebut dijalankan kembali pihak Pemprov DKI Jakarta harus lebih selektif di dalam pendataan lokasi dan kepemilikan tanah (Pemkot Jakarta Timur, Januari 2015).

## Kesimpulan

Program pembangunan Kampung Deret merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menanggulangi

permasalahan permukiman kumuh. Sebagai hasil pelaksanaan program, menunjukkan hunian warga lebih layak untuk dihuni disertai lingkungan yang tertata dan lebih sehat dengan dilengkapi berbagai sarana fasilitas umum. Dibandingkan dengan sebelum pembangunan rumah deret, kualitas lingkungan permukiman terbilang buruk dengan gambaran kondisi dalam keadaan kumuh dan tidak tertata.

Selain itu, terdapat perbedaan gambaran partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program Kampung Deret di setiap wilayah, seperti Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan, yang disebabkan oleh berbedanya setiap respon dan tindakan yang datang dari masyarakat pada setiap wilayah. Partisipasi masyarakat ditentukan oleh adanya hubungan sosial timbal balik antara warga, juga antara warga dengan pemerintah, yang didalamnya terdapat unsur rasa percaya, nilai dan norma sosial. Penelitian ini merekomendasikan agar peneliti selanjutnya melakukan kajian tentang pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan program permukiman kumuh di Jakarta.

Pembangunan permukiman deret selain merupakan pembangunan dalam aspek fisik, namun berkaitan juga dengan aspek sosial. Tampak perubahan kondisi pada masyarakat setelah pelaksanaan pembangunan rumah deret, menunjukkan adanya kebersamaan, tanggungjawab warga dan rasa memiliki terhadap lingkungan, kemudian peningkatan kualitas hidup warga yang ditandai dengan keberadaan rumah yang lebih layak huni dengan lingkungan yang lebih nyaman dan sehat.

Terkait keberlanjutan permukiman sebagai hasil pembangunan program, dari sisi masyarakat dibutuhkan partisipasi segenap masyarakat untuk menjaga kebersihan dan keasrian lingkungannya agar tidak kembali kepada kesan kumuh. Selanjutnya dari aspek pemerintah, dengan segala kendala yang dihadapinya, perlu untuk segera membenahi permasalahan kawasan dan permukiman kumuh di Jakarta.

Dalam pelaksanaan program Kampung Deret sebelumnya telah menjangkau 4.467 Kepala Keluarga di Jakarta, tentu diharapkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan wilayah, mengatasi persoalan hak kepemilikan tanah dan memfasilitasi masyarakat memperoleh dokumen

hak kepemilikan tanah. Selain itu yang menjadi sorotan adalah mengidentifikasi dan mengelola modal sosial yang ada dimiliki masyarakat sebelum melaksanakan program, untuk merangkul dan menjaga partisipasi sekaligus rasa percaya masyarakat terhadap program dan pelaksana program.

## Daftar Pustaka

- Adeymi, O., & Shackleton, C. M. (2023). Understanding foraging practices in Lagos metropolis to redesign urban greenspaces in support of human-nature interactions. *Urban Forestry & Urban Greening Journal*, 79, 127805. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2022.127805>
- Adi, I., R. (2013). *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Aditantri, R. dan Jamila R., F. (2019). Program Perbaikan Kampung Di Kampung Deret Petogogan, Jakarta Selatan. *Journal of Urban Planning Department Podomoro University*, 2(1), 33-43. <http://journal.podomorouniversity.ac.id/index.php/UPPDR/article/view/104/88>
- Alfarabi, A., W. Widyawati, K., Budiarto A. (2019). Perancangan Kampung Deret Bernuansa Alam Di Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat Dengan Pendekatan Arsitektur Lingkungan. *Prosiding Seminar Nasional Komunitas dan Kota Keberlanjutan*, 1(1), 185-191. <https://doi.org/10.30998/snkkb.v1i1.3910>
- Alfitri. (2011). *Community Development Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ashadi et al. (2022). Perubahan Tata Ruang dan Fungsi Kampung Akuarium Jakarta. *Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan*, 20 (1), 51-64. <https://doi.org/10.20961/arst.v20i1.55928>
- Babbie E. (2004). *The Practice of Social Research*. USA: Wadsworth Thomson Learning Inc.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Statistik Perumahan Provinsi DKI Jakarta 2022*. Jakarta: BPS DKI Jakarta.
- Chimankar D.A. (2016). Urbanization and Condition of Urban Slums in India. *Indonesian Journal of Geography*, 48(1), 28-36. <https://doi.org/10.22146/ijg.12466>
- Cresswell, J.W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. United Kingdom: Sage.
- Creswell, J.W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daldjoeni, N. (2003). *Geografi Kota dan Desa*. Bandung: PT. Alumni
- Darmawan, B. (2014). *Analisis Risiko Pada Pelaksanaan Program Bantuan Perbaikan Rumah Di Permukiman Kumuh Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Anggaran*. Tesis, Depok: Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20404080&loaksi=lokal>
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. (2020). *Bantuan Perbaikan Rumah Di Permukiman Kumuh Melalui Penataan Kampung (Penataan Kampung Deret)*. [https://dprkp.jakarta.go.id/?cmd=product-kampung\\_deret](https://dprkp.jakarta.go.id/?cmd=product-kampung_deret)
- Demehin, M.O. (2022). Urbanization, Urban-Slum Settlements and its Implications on Health: An Insight from Lagos State, Nigeria. *International Journal of Social Sciences: Current and Future Research Trends*, 13(1), 117-132. [https://ijsscfrtjournal.isrra.org/index.php/Social\\_Science\\_Journal/article/view/996](https://ijsscfrtjournal.isrra.org/index.php/Social_Science_Journal/article/view/996)
- Eni, S., P. (2015) *Upaya-upaya Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Dalam Mengatasi Masalah Permukiman Kumuh Di Perkotaan*. *Scale*, 2(2), 243-252.
- Firdaus, M.S.A. (2018). Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Penyediaan Hunian. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 2(2), 77-87. <https://doi.org/10.37145/jak.v2i2.31>
- Florensetina dan Aditantri, R. (2022). Efektivitas Program Kampung Deret Berdasarkan Indikator Kotaku. *Vitruvian Jurnal Arsitektur Bangunan dan Lingkungan*, 12(1), 13-32. <https://dx.doi.org/10.22441/vitruvian.2022.v12i1.002>

- Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2013). Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 64 Tahun 2013 tentang Bantuan Perbaikan Rumah di Permukiman Kumuh
- Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2018). Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu
- Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2021). Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana Dan Sarana Di Kawasan Perumahan Dan Permukiman
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Izzatusholekha, Salam R., Furqon, M. (2023). Kebijakan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 3 Tahun 2014. *Jurnal Swatantra*, 20 (1), 73-82. <https://doi.org/10.24853/swatantra.21.1.73-82>
- Komarudin. (1997). *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*. Jakarta: Yayasan Realestat Indonesia.
- Lasaiba, M.A. (2022). Perkotaan dalam Perspektif Kemiskinan, Permukiman Kumuh dan Urban Heat Island (Suatu Telaah Literatur). *Geoforum Jurnal Geografi dan Pendidikan Geografi*, 1(2), 20-30. <https://doi.org/10.30598/geoforumvol1iss2pp63-72>
- Lawang, R.M.Z. (2005). *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik*. Depok: FISIP UI Press.
- Machio, R. (2015). *Pengelolaan Proyek Pembangunan Kampung Deret Dengan Sistem Prafabrikasi Untuk Meningkatkan Kinerja Waktu*. Tesis, Depok: Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20414422&lo kasi=lokal>
- Makhmud, Desy F., et al. (2017). Mewujudkan Kampung Bandan sebagai Kampung Kota Berkelanjutan Menggunakan Pendekatan Asian New Urbanism. *Vitruvian: Jurnal Arsitektur, Bangunan, dan Lingkungan*, 6 (3), 91-100. <https://dx.doi.org/10.22441/vitruvian>
- Marcel, F.A. (2013). *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Deret Di RT 014 RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat*. Tesis, Depok: Universitas Indonesia.
- Masika, R. (1997). *Urbanisation and Urban Poverty*. Sussex: Institute of Development Studies University of Sussex.
- Midgley, J. (2014). *Social Development: Theory & Practice*. London: SAGE Publication.
- Mikkelsen, B. (2005). *Methods for Development Work and Research: A New Guide for Practitioners*. California: Sage Publication
- Mwamba S.J., Peng Z. (2020). Analysis of Informal Urban Settlement Upgrading: The Case of Ng'ombe Slum Upgrading in Zambia. *Current Urban Studies*, 8(4), 509-532. <https://doi.org/10.4236/cus.2020.84028>
- Neuman, W. Lawrence. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition*. Harlow: Pearson Education Limited
- Ngoyo, M. F. (2018). Mengawal Sustainable Development Goals, Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan. *Jurnal Sosioreligius*, 1(1), 77-88. <https://doi.org/10.24252/sosioreligius.v1i1.4525>
- Nitin, M., Kisan A., Suresh D., Krishna B. (2021). Urbanization and Growth of Slums In India: Evidence From Census of India. *Jurnal Towards Excellence Gujarat University (2001-2011)*, 13(2), 942-956. <https://doi.org/10.37867/te130280>
- Nurdiansyah, A. (2018). Urban Slum Upgrading Policy in Jakarta (Case Study: Kampung Deret Program Implementation). *The Indonesian Journal of Planning and Development*, 3(1), 19-31. <https://doi.org/10.14710/ijpd.3.1.19-31>
- Octavionesti, A. & Mardiansjah, F. H. (2017). Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Pembangunan Rusunawa: Studi Kasus Rusunawa Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah. *Jurnal Riptek*, 2(1), 41-56. <https://doi.org/10.35475/ripteck.v1i1.37>

- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (Maret 2022). Kampung Deret. <https://www.jakarta.go.id/kampung-deret>.
- Pinesti, B., S. (2017). Kampung deret: Kajian kualitas hunian dari perspektif teori John F.C Turner. Skripsi, Depok: Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20385813&lo kasi=lokal>
- Poerwanti, S. D., Makmun, S., Dewantara, A.D. (2024). Jalan Panjang Menuju Inklusi Digital bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Journal of Urban Sociology*, 7 (1),44-55, <http://dx.doi.org/10.30742/jus.v1i1.3536>
- Pramantha, R., Q. (2017). Proses Perencanaan Kampung Deret Petogogan Dengan Metode Peremajaan Dan Teknologi Risha (Rumah Instant Sederhana Sehat) Berdasarkan Pendekatan Gabungan Top-Down Dan Partisipasi Warga Di Kelurahan Petogogan, Kota Jakarta Selatan. *Proceedings Of National Colloquium Research And Community Service*, 1, 331-335. <https://doi.org/10.33019/snppm.v1i0.550>
- Pranata, E., Madani M., Arifin J. (2019). Dampak Sosial Terhadap Rencana Pembangunan Perumahan Regional di Kawasan Pangi Desa Latali Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara. *Equilibrium Jurnal Pendidikan*, 7(2), 211-217. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v7i2.2635>
- Puji. (2015, January 23). Program Kampung Deret Tidak Akan Dibangun di Atas Tanah Negara. *Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemkot Jakarta Timur*. <https://timur.jakarta.go.id/berita/145/progr am-kampung-deret-tidak-akan-dibangun-di-atas-tanah-negara>
- Putra. B.P.S. (2016). Evaluasi Pembangunan Program Kampung Deret Studi Kasus: Kampung Deret Petogogan. Tesis, Depok: Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=20432348&lokasi=lokal>
- Putri K., Ridlo M. (2023). Studi Literatur: Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Di Perkotaan. *Jurnal Kajian Ruang*, 3(1), 104-147. <http://dx.doi.org/10.30659/jkr.v3i1.22909>
- Rahmawati, F., N. (2017). Pengorganisasian masyarakat Kampung Deret Cipinang Besar Selatan dalam program pemberdayaan masyarakat: studi kasus: program pertanian perkotaan. Skripsi, Depok:Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20458098#digital#digital>
- Rahmawati, L. (2014, March 19). Kampung Deret Pasar Minggu bikin Warga Tak Akur. <https://megapolitan.kompas.com/read/2014/03/19/1355235/Kampung.Deret.Pasar.Minggu.Bikin.Warga.Tak.Akur>
- Rukmana, D. (2018). Upgrading Housing Settlement for the Urban Poor in Indonesia: An Analysis of the Kampung Deret Program, In book: *Metropolitan Governance in Asia and the Pacific Rim*, 75-94. [http://dx.doi.org/10.1007/978-981-13-0206-0\\_5](http://dx.doi.org/10.1007/978-981-13-0206-0_5)
- Safitri S. & Safitri R. (2021). Kajian Perubahan Kualitas Lingkungan Pasca Revitalisasi Pada Kampung Deret Petogogan, Jakarta Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Komunitas dan Kota Keberlanjutan*, 3(2), 655-664. (uph.edu)
- Sair, A. (2015). Penanggulangan Bencana Berbasis Pengembangan Komunitas (Community Development). *Jurnal Entitas Sosiologi*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2015. Hal 181-201
- Sair, Abdus. (2015). Strategi Membangun Kota Tangguh Bencana Melalui Program Pengelolaan Sampah Mandiri Berbasis Komunitas Di Kota Surabaya. *Proceeding, International Seminar on Disaster*. pp. 199-219. ISSN 9786027357433
- Setyanti, C., A. (2014, October 16). Warga Kampung Deret Petogogan Pilih Sumur Baru daripada Air PAM yang Keruh. <https://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/16/07130081/Warga.Kampung.Deret.Petogogan.Pilih.Sumur.Baru.daripada.Air.PAM.yang.Keruh>
- Singh, K., A. (2014). *Urban Slums: An Enquiry into Concept, Characteristics and Policy Interventions*. Varanasi: Banaras Hindu University.

- Susilowati, M.H.D. (2016). *Perkembangan Permukiman Di DKI Jakarta*. Pusat Penelitian Geografi Terapan Universitas Indonesia, 1-9. <https://ppgt.ui.ac.id/wp-content/uploads/62/2016/09/MH-Dewi-Perkembangan-permukiman-di-DKI-Jakarta.pdf>
- Tamba, W., P. (2015). *Partisipasi masyarakat dalam keberlanjutan lingkungan permukiman Kampung Deret RW 02 Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur*. Tesis, Depok, Indonesia: Universitas Indonesia. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20415906&lokasi=lokal>
- Turner, J.F.C., Fitcher. (1972). *Freedom to Build*. New York: Collier Macmillan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Verdiansyah, C. (2006). *Politik Kota dan Hak Warga Kota Masalah Keseharian Kota Kita*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Wiguna, D.K.S. (2023, January 6). *Heru Tata Permukiman Kumuh di 250 RW di Jakarta*, <https://www.antaraneews.com/berita/3338484/heru-tata-permukiman-kumuh-di-250-rw-di-jakarta>
- Winardi. (2002). *Motivasi dan Pemoivasian dalam Manajemen*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Yandri P., Juanda B. (2018). *Memahami Karakter Kemiskinan Perkotaan Dengan Pendekatan Observasional*. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 19(1), 75-84. <https://doi.org/10.18196/jesp.19.1.4276>
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.